

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

20 Triliun APBD DKI Ngendon

Katua DPRD: Perencanaan Anggaran Buruk

JAKARTA (Pos Kota) – Mendekati tutup tahun, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2019 sebesar Rp20,2 triliun belum terserap alias masih ngendon. Angka ini dari alokasi anggaran belanja langsung dan tak langsung Rp77,8 triliun, tetapi yang terserap baru Rp57,5 triliun.

Rinciannya, belanja langsung diserap Rp29,5 triliun dari alokasi Rp44,5 triliun, atau 66,2 persen. Belanja langsung, yakni belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Sementara serapan belanja tidak langsung sebesar 84,5 persen. Anggaran diserap Rp28,1 triliun dari alokasi Rp33,2 triliun. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, hibah, bunga, subsidi, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan biaya tak terduga.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, serapan anggaran akan terus meningkat hingga tutup tahun anggaran 2019. Sebab, Pemprov DKI Jakarta belum membayar proyek-proyek pembangunan fisik.

"Pembangunan fisik, kontraktor belum menagih pembayaran. Kami masih menunggu 20 Desember. Dia menagih dulu, nanti kami verifikasi, baru bayar," ujar Saefullah di Balai Kota Pemprov DKI Jakarta, Kamis (19/12).

Saefullah optimistis serapan APBD 2019 akan menembus 85 persen. Dia yakin serapan anggaran tahun ini akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. "Pokoknya selalu lebih baik dari tahun lalu," tegasnya.

DESAK KEMENDAGRI

Adapun serapan APBD 2018 tercatat sebesar 82,03 persen. Serapan anggaran tahun 2018 lebih rendah dari tahun 2017. Pada 2017, serapan APBD mencapai 82,60 persen atau 0,57 persen lebih tinggi dari serapan 2018.

Dalam kesempatan yang sama, Saefullah Kementerian Dalam Negeri segera menyetujui APBD tahun 2020. Sehingga pada Januari pembangunan sudah bisa berjalan. "Saya sudah kejar, janjinya Jumat (20/12) besok sudah selesai," ucapnya.

Menurut Saefullah, Pemprov DKI Jakarta dan DPRD bisa segera memperbaiki Raperda tentang APBD dan mengesahkannya menjadi perda sebelum tahun anggaran 2020 dimulai.

Saefullah berharap, Kemendagri menyetujui seluruh anggaran yang diajukan. Agar, saat evaluasi tidak memakan waktu lama. "Jika tidak ada evaluasi dari Kemendagri maka APBD segera bisa ditetapkan sebagai Perda," kata Saefullah.

Adapun draf Perda APBD 2020 sudah disampaikan sejak Kamis (12/12) lalu ke Kemendagri.

MASIH DIEVALUASI

Secara terpisah, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin menyampaikan, Raperda APBD DKI 2020 masih dievaluasi. Evaluasi diperkirakan tuntas dalam tempo 10 hari kerja. "Kami terima hari Kamis sore pekan lalu. Kami usahakan, 10 hari kerja bisa selesai," katanya.

Menurut Syarifuddin, anggaran Pemprov DKI Jakarta yang sudah dievaluasi sekitar 50 persen. Namun ia belum mau membocorkan hasil evaluasi terhadap Raperda tentang APBD DKI 2020.

PERENCANAAN BURUK

Masih menumpuknya anggaran mengundang reaksi Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. "Ini bukti perencanaannya buruk," tegasnya.

Politisi PDI-P yang akrab disapa Pras ini, menilai duit Rp20 triliun masih ngendon tergolong besar. Mengingat tahun anggaran 2019 cuma menyisakan waktu sepekan lagi.

"Agar target bisa tercapai, maka sehari Pemprov DKI Jakarta harus menghabiskan uang sekitar Rp2,8 triliun. Ini jumlah yang cukup besar," ucap Pras.

Pras menambahkan, bila perencanaan dan pengerjaan proyek sesuai dengan jadwal maka pembayaran tidak akan menumpuk di akhir tahun. "Dengan masih banyaknya pelaksana proyek belum menagih, artinya pengerjaan mereka bisa dikatakan molor. Seharusnya 15 Desember, Pemprov DKI Jakarta hanya tinggal membayar," tandasnya.

(john/ruh/st)